

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekuasaan dan Kepemimpinan Masyarakat Adat

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain sehingga mereka bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin. Kepemimpinan dapat dibedakan menjadi dua kategori: kepemimpinan berdasarkan posisi dan kepemimpinan dalam proses sosial. Pembagian ini melahirkan dua jenis pemimpin: pemimpin resmi dan pemimpin tidak resmi. Pemimpin resmi adalah mereka yang memegang jabatan formal, sedangkan pemimpin tidak resmi diakui oleh pengikut mereka tanpa adanya jabatan formal. Pemimpin resmi bekerja sesuai dengan aturan resmi, sementara pemimpin tidak resmi lebih fleksibel dan tidak terikat oleh aturan tersebut.

Kepemimpinan terbentuk sebagai hasil dari organisasi sosial atau dinamika interaksi sosial. Sejak awal terbentuknya kelompok sosial, individu tertentu diakui memiliki peran lebih besar dan dianggap mampu memimpin. Pemimpin juga dapat muncul dalam situasi tak terduga yang membutuhkan seseorang untuk mengarahkan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi kelompok. Proses dinamis ini menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok dan dipengaruhi oleh situasi serta kondisi masyarakat. Dari kepemimpinan ini, muncul kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, seperti yang dikutip oleh (Masinambow, 1997) dari pandangan Max Weber.

2.2. Konsep Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan Adat merujuk pada sistem Kepemimpinan yang terkait erat dengan Budaya, Tradisi, dan norma-norma suatu Kelompok Masyarakat tertentu. Yang artinya, Pemimpin Adat memegang peran penting dalam mengoordinasikan kehidupan Masyarakat, menjaga nilai-nilai Budaya, dan mengambil keputusan yang berdampak pada Masyarakat secara keseluruhan. Kepemimpinan Adat sering kali berbeda dengan Kepemimpinan Formal yang diatur oleh struktur seperti Pemerintahan Modern, karena didasarkan pada Warisan Budaya dan Dihormati oleh Masyarakat setempat. (Suryami, 2017)

Di dalam bentuk-bentuk Kepemimpinan Adat di suatu Masyarakat ada beberapa point-poin yang cukup mendeskripsikan konsep Kepemimpinan Adat. :

2.2.1. Kewenangan Tradisional Adat

Pemimpin Adat memperoleh kewenangan mereka dari Tradisi dan norma-norma Budaya yang telah ada dalam Masyarakat. Kepemimpinan ini mungkin diwarisi, diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, atau melalui Upacara Adat khusus, Pemimpin Adat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan internal Komunitas Adat, seperti pemilihan Kepemimpinan, penyelesaian konflik internal, dan pengelolaan sumber daya alam Tradisional.

Pemimpin Adat memiliki peran dalam menjaga dan menegakkan norma, aturan, dan Tradisi yang berlaku dalam Masyarakat Adat. Mereka seringkali menjadi penjaga nilai-nilai Budaya dan etika yang dianut oleh komunitas tersebut. Dalam banyak kasus, pemimpin adat memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya alam Tradisional seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian dari eksploitasi yang berlebihan. Mereka dapat mengatur penggunaan dan akses terhadap sumber daya ini. Pemimpin Adat sering berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik internal antar Anggota Komunitas atau konflik dengan Komunitas lain. Mereka menggunakan pengetahuan Budaya dan hukum Adat untuk mencapai penyelesaian yang adil. Pemimpin Adat dapat Memimpin Upacara dan Ritual Keagamaan atau Budaya yang penting bagi komunitas Adat. Mereka seringkali memiliki peran kunci dalam menjaga keberlanjutan dan autentisitas Tradisi ini. Pemimpin Adat juga dapat berfungsi sebagai Perwakilan Komunitas Adat dalam interaksi dengan Pemerintah, Organisasi non-Pemerintah, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Mereka membela hak-hak Komunitas dan kepentingan Budaya mereka di tingkat Nasional atau Internasional. (Nopianti, 2016).

2.2.2. Peran dalam Menjaga Tradisi

Menurut (Wijarnako, 2013) Pemimpin Adat bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Tradisi, Kepercayaan, dan nilai-nilai Budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka sering kali menjadi penjaga Warisan Budaya dan Sejarah Lokal. Sebagai penjaga utama nilai-nilai Budaya yang mendasari Masyarakat Adat. Mereka memastikan bahwa nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap Leluhur, keberlanjutan lingkungan, dan etika Sosial tetap terpelihara dan diteruskan kepada Generasi Muda. Pemimpin Adat seringkali bertindak sebagai Pemimpin dalam Upacara dan Ritual Keagamaan atau Budaya. Mereka

memastikan bahwa Upacara tersebut dilaksanakan sesuai dengan Tradisi, tata cara yang benar, dan makna yang mendalam.

Juga berperan dalam pendidikan Budaya, baik melalui pengajaran langsung kepada generasi muda tentang Tradisi dan Warisan Budaya, maupun dengan mempromosikan program pendidikan yang bertujuan untuk memahamkan Masyarakat tentang Budaya mereka. Ketika ada konflik Internal yang berkaitan dengan Tradisi atau Budaya, Pemimpin Adat sering berfungsi sebagai mediator. Mereka membantu menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan norma Budaya dan mencari solusi yang menghormati nilai-nilai Tradisional. Juga biasanya berperan di berbagai hal misal Penyelesaian Konflik ,menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di Masyarakat. Karena mereka memiliki wawasan mendalam tentang norma-norma Budaya, mereka dapat membantu meredakan ketegangan dan menemukan solusi yang sesuai dengan Tradisi. Pengambilan Keputusan Pemimpin Adat sering memiliki peran dalam mengambil keputusan penting yang mempengaruhi masyarakat. Ini bisa meliputi keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, Upacara Adat, atau kebijakan internal masyarakat.

Representasi Masyarakat Pemimpin Adat sering kali dianggap sebagai wakil Masyarakat dalam hubungan dengan pihak luar, termasuk Pemerintah, Lembaga non-pemerintah, dan kelompok lainnya. Orientasi pada Kesejahteraan Bersama Kepemimpinan Adat berfokus pada kesejahteraan dan keharmonisan Masyarakat secara keseluruhan. Tujuan mereka lebih berfokus pada aspek Sosial dan Budaya daripada pada keuntungan Individual. Dalam berbagai Budaya dan Komunitas di seluruh dunia, Kepemimpinan Adat memainkan peran yang penting dalam memelihara identitas Budaya, mengatur kehidupan Sosial, dan membentuk pandangan Masyarakat terhadap dunia. Meskipun konteksnya bervariasi, Kepemimpinan Adat sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal yang mendalam dan dihormati oleh anggota Masyarakat. (Wijarnako, 2013)

2.3. Teori Kepemimpinan dan Kekuasaan

Teori-teori Kepemimpinan dan Kekuasaan yang diterapkan pada konteks Kepemimpinan Adat dapat memberikan kerangka kerja konseptual untuk memahami bagaimana Kekuasaan Dijalankan dan Dinamika di dalamnya. Teori Kepemimpinan dan Kekuasaan mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang membantu menjelaskan bagaimana individu atau kelompok mempengaruhi orang lain, mengambil keputusan, dan Memimpin dalam berbagai

konteks. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana Kekuasaan diakui, Di distribusikan, dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Leza, 2018)

Kepemimpinan adalah suatu proses kompleks di mana seorang Pemimpin memengaruhi bawahannya dalam upaya melaksanakan dan mencapai visi, misi, tugas, atau objektif-objektif yang membawa organisasi menuju kemajuan dan persatuan. Seorang Pemimpin menerapkan berbagai sifat Kepemimpinan yang dimilikinya, seperti kepercayaan, nilai-nilai, etika, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki.

Menurut (Syahril, 2019). Kepemimpinan adalah Hubungan yang ada dalam diri seorang Pemimpin yang memengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam konteks tugas guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ini adalah proses yang mengatur dan memengaruhi kinerja untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kepemimpinan melibatkan pengaturan situasi tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Harbani menjelaskan bahwa Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain, baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan mendorong mereka untuk mengikuti arahan Pemimpin dengan pemahaman, kesadaran, dan sukarela. Tujuannya adalah agar orang-orang bersedia mengikuti petunjuk dan arahan Pemimpin dengan penuh pengertian dan kesenangan hati.

Kepemimpinan dapat di sebut juga sebagai aspek penting dalam mengelola dan membimbing individu serta kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Ini mencakup berbagai elemen yang melibatkan interaksi antara Pemimpin dan yang dipimpin, serta strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai konteks organisasi dan kehidupan sehari-hari.

2.4. Teori Kepemimpinan Situasional

Teori menurut (Faturahman, 2019) mengemukakan bahwa Kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi tertentu. Kepemimpinan yang tepat dapat bervariasi berdasarkan tingkat keterampilan dan kematangan bawahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dan mengubah gaya Kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan Karakteristik individu yang dipimpinnya. Teori Kepemimpinan mengindikasikan bahwa terdapat variasi tahap dalam pengembangan pemimpin dan bawahan dalam suatu lingkungan yang terkendali, dengan berbagai variabel situasi yang krusial untuk tingkat kesiapan bawahan. Seorang Pemimpin harus mampu secara efektif mengelola berbagai variabel situasi sementara tetap

menjaga ketabahan dalam mencapai tujuan dengan tepat. Akibatnya, mereka memiliki kecenderungan untuk menggunakan pengaruh yang tidak memaksa untuk membimbing anggota tim menuju tujuan bersama dan tujuan umum organisasi.

Pemimpin sering mengakselerasi perkembangan bawahannya dalam hal kepemilikan dan tanggung jawab terkait layanan tertentu yang mereka mampu membantunya. Di sinilah peran Kepemimpinan mulai memberikan tekanan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, dan bawahan diharapkan mampu mendorong diri mereka sendiri dalam menemukan pekerjaan sebagai kebutuhan pribadi mereka. Oleh karena itu, banyak Pemimpin menilai keahlian dan kemampuan mereka untuk membantu pekerja menjadi lebih mandiri. Studi tentang Kepemimpinan sering mendominasi literatur dalam manajemen, Kepemimpinan Politik, atau perilaku Organisasi. Review oleh para Peneliti yang terpelajar memberikan gambaran tentang sifat individu, perilaku, pola interaksi, peran mitra, persepsi pengikut, pengaruh terhadap pengikut, pengaruh terhadap tujuan, dan dampaknya pada Budaya Organisasi secara keseluruhan. Pendekatan Kepemimpinan ini mengindikasikan kelemahan secara konseptual dan pemisahan dari realitas empiris. Meskipun demikian, dalam memahami Kepemimpinan, terdapat kemajuan dalam studi tentang sifat Kepemimpinan, perilaku, kekuasaan, dan faktor-faktor Situasional. Ini berarti bahwa Kepemimpinan menghadapi banyak tanggung jawab, termasuk bagaimana menggunakan Kekuasaan, Pengaruh, dan Perilaku dengan tepat dan berkelanjutan, terlebih lagi dalam jangka pendek. (Faturahman, 2019).

2.5. Teori Kepemimpinan Transformasional

Teori Kepemimpinan Transformasional menurut (Nurhayati, 2016) menekankan pengaruh Pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan mengubah bawahan mereka untuk mencapai potensi terbaik. Pemimpin Transformasional mendorong pengembangan pribadi, membantu bawahan untuk mengembangkan visi yang lebih besar, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan organisasi dengan komitmen tinggi. Menurut pandangan (Babbie, 2020), para sosiolog cenderung lebih tertarik untuk menyelidiki dan mendalami peran seseorang sebagai pemimpin dalam sebuah kelompok kecil. Argumentasinya didasarkan pada pemahaman bahwa sering kali terjadi bias dalam penilaian terhadap pemimpin, yaitu keyakinan bahwa seseorang yang mampu memimpin dalam skala yang lebih besar juga akan mampu memimpin dalam skala yang lebih kecil.

Pemahaman ini lebih dikenal dengan istilah "generalisasi status." Dalam teori ini, Generalisasi status merujuk pada kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa keunggulan seseorang dalam suatu situasi tertentu akan menghasilkan keunggulan yang sama dalam situasi lain. Namun, kenyataannya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat kemampuan seseorang untuk berhasil dalam berbagai situasi. Menurut analisis Dwi Suryanto, konsep Kepemimpinan Transformasional telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kilasan konsep ini, seperti mimpi-mimpi baik orang saleh, memiliki makna yang mendalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, mimpi merupakan salah satu dari empat puluh tanda kenabian.

Di zaman kuno China, pemimpin-pemimpin seperti *Confucius* dan *Ashoka* mendorong individu-individu yang memegang Kekuasaan untuk menjadi pembawa Perubahan Moral yang tinggi bagi pengikut-pengikut mereka. Mereka dianggap sebagai teladan bagi Masyarakat. Kepemimpinan Transformasional muncul sebagai respons terhadap tuntutan Zaman yang membutuhkan perubahan di berbagai aspek. Konsep ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan Pemimpin akan Penghargaan pribadi, tetapi juga mendorong Pemimpin untuk berusaha yang terbaik sesuai dengan perkembangan manajemen dan Kepemimpinan. Pendekatan ini mengakui bahwa entitas-entitas dalam Kepemimpinan saling memengaruhi satu sama lain, menciptakan hubungan dinamis di antara mereka. (Nurhayati, 2016).

2.6. Teori Kepemimpinan Transaksional

Teori ini mengacu pada hubungan antara Pemimpin dan bawahan yang didasarkan pada pertukaran atau transaksi tertentu. Pemimpin Transaksional memberikan insentif, penghargaan, dan sanksi kepada bawahan sebagai respons terhadap pencapaian tujuan atau perilaku tertentu. Interaksi ini berfokus pada kepatuhan dan pencapaian target. Konsep kepemimpinan Transaksional pertama kali dirumuskan oleh Burns (1978) seperti yang diungkapkan dalam penelitian deskriptifnya terhadap pemimpin-pemimpin Politik, (Hoxha, 2015), dan kemudian diperkenalkan ke dalam konteks organisasi oleh Bass. Menurut Burns, kepemimpinan transaksional, sebagaimana diuraikan dalam karya Yukl (Yukl, 2010), adalah cara untuk memotivasi pengikut dengan menunjukkan pada mereka kepentingan diri sendiri.

Pemimpin Transaksional dalam dunia Politik sering kali melakukan tukar-menukar pekerjaan, memberikan subsidi, atau mengadakan kontrak-kontrak Pemerintah yang menguntungkan guna memperoleh dukungan suara dan kontribusi untuk kampanye mereka.

Di dunia bisnis, Pemimpin Transaksional seringkali menukar upah dan status untuk mendorong pengikut untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan spesifik.

Kepemimpinan Transaksional memang berkaitan dengan nilai-nilai, tetapi nilai-nilai ini berkorelasi dengan proses pertukaran. Nilai-nilai tersebut melibatkan aspek seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan pertukaran. Istilah "*Transactional*" mengacu pada cara Pemimpin ini memotivasi pengikut untuk melakukan apa yang diinginkannya. Pemimpin Transaksional mengidentifikasi keinginan-keinginan pengikut dan memberikan imbalan atau penghargaan yang sesuai sebagai hasil dari pencapaian tugas-tugas tertentu atau pencapaian sasaran yang ditentukan. Dengan demikian, terdapat proses pertukaran antara Pemimpin dan pengikut, di mana pengikut menerima penghargaan atas kinerja pekerjaan mereka, sementara pemimpin mendapatkan manfaat dari pencapaian tugas-tugas tersebut. (Rosnani, 2012)

2.7. Teori Kekuasaan Berdasarkan Sumber Daya

Teori ini (Hidayat, 2018) menekankan bahwa Kekuasaan seorang Pemimpin tergantung pada Sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sumber daya ini dapat berupa Pengetahuan, Keterampilan, Informasi, akses ke orang-orang penting, atau kendali atas Sumber daya materi. Kekuasaan Demokratis yang dimiliki oleh banyak orang dapat mengancam Stratifikasi kelas dengan mengambil dan mendistribusikan Kekayaan yang sebelumnya dikuasai oleh segelintir orang. Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, perebutan Kekuasaan di Pedesaan menjadi suatu kombinasi yang rumit antara Oligarki dan Demokrasi. Akibat tingginya Polarasi dalam kepemilikan tanah, kemampuan untuk menggunakan sumber daya kekayaan secara strategis menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam politik desa. Sebagai contoh, dalam konteks pemerintahan oligarki desa Sitimerto, Haji Mul berhasil membangun sebuah Dinasti Politik keluarga selama era desentralisasi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi Desa telah memberikan peluang bagi munculnya Oligarki Desa yang memegang kendali melalui proses demokratisasi dalam pemilihan Kepala Desa. (Hidayat, 2018).

Aktor yang diberdayakan oleh kekayaan dan Sumber daya merupakan yang paling menonjol di antara bentuk-bentuk Kekuasaan lainnya. Kekayaan memiliki kemampuan yang

jelas dan serbaguna dalam arti dapat dengan mudah diubah menjadi berbagai bentuk kekuasaan yang lain. Oligarki berbeda dari kelompok elit yang menggunakan pengaruh mereka dalam kelompok minoritas berdasarkan Sumber daya Kekuasaan yang tidak berwujud. Kategori oligarki dan elit dapat saling tumpang tindih dengan potensi Kekuasaan Oligarkis yang mengarah kepada kekuasaan elit, begitu juga sebaliknya. Namun, keduanya tidak selalu bersinggungan. Banyak Oligark hanya memiliki Sumber daya material, sementara banyak elite tidak pernah mengumpulkan kekayaan yang dapat menghasilkan Kekuasaan. (Hidayat, 2018).

2.8. Teori Kekuasaan Berdasarkan Hubungan

Teori ini fokus pada bagaimana hubungan Interpersonal memengaruhi distribusi Kekuasaan. Kekuasaan dapat berasal dari hubungan positif yang dibangun oleh Pemimpin dengan bawahan, seperti saling percaya, dukungan, dan koneksi emosional. Di dalam teori Kekuasaan berdasarkan hubungan dapat di kaitkan sebagai berikut:

1. Kekuasaan dalam Konteks Budaya dan Tradisi: Teori ini menekankan pentingnya memahami bahwa konsep kekuasaan dalam masyarakat adat dapat sangat berbeda dari definisi kekuasaan dalam budaya modern atau sistem politik. (Kartono, 2005) Kekuasaan sering kali terkait erat dengan nilai-nilai, norma, dan tata cara budaya yang telah ada selama berabad-abad.
2. Hubungan Antara Kepemimpinan dan Masyarakat menurut (Hijjang, 2014) Dalam banyak masyarakat adat, kekuasaan seringkali tidak sentralistik seperti dalam sistem pemerintahan modern. Kekuasaan dapat didistribusikan di antara berbagai kepemimpinan adat, yang mungkin memiliki peran dan tanggung jawab khusus. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat sangat penting dalam konteks ini, dan pemimpin sering dipilih berdasarkan norma-norma budaya atau tradisi tertentu.
3. Sistem Warisan dan Garis Keturunan: Di banyak masyarakat adat, kekuasaan dapat ditransmisikan melalui garis keturunan atau warisan budaya tertentu. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau garis keturunan tertentu mungkin memiliki hak khusus atau akses lebih besar ke dalam kekuasaan adat. (Febriawanti, 2020).
4. Konteks Sejarah dan Perubahan: Hubungan antara kekuasaan dan hubungan sosial dapat berubah seiring waktu. Perubahan dalam masyarakat adat, termasuk interaksi

dengan budaya luar atau perubahan ekonomi, dapat memengaruhi cara kekuasaan dipahami dan dijalankan dalam masyarakat tersebut. (Rachmah, 2018).

5. Peran Hubungan Sosial: Teori ini memperhatikan bahwa hubungan sosial, termasuk jaringan kekerabatan, persahabatan, dan interaksi sehari-hari antara individu, dapat memainkan peran penting dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat adat. (Nita, 2017).
6. Kepentingan Bersama dan Konsensus: dalam beberapa masyarakat adat, pengambilan keputusan dan pengelolaan kekuasaan dapat bergantung pada pencapaian konsensus dan pertimbangan kepentingan bersama. Proses ini sering melibatkan dialog dan musyawarah antara anggota komunitas. (Bauw, 2009).

2.9. Teori Kekuasaan Berdasarkan Legitimasi

Teori ini mengacu pada Kekuasaan yang muncul dari posisi atau status yang diakui secara sosial atau lembaga. (Sentra, 2022) Kekuasaan ini didasarkan pada legitimasi formal, seperti hierarki organisasi, status sosial, atau otoritas hukum. Dalam konteks legitimasi kekuasaan, ketika seseorang memegang jabatan dan memiliki kekuasaan yang sah, hal ini terjadi ketika individu tersebut telah mengalami pengangkatan resmi, sehingga dia dianggap sah dalam posisinya dan berwenang untuk menjalankan kekuasaannya.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kekuasaan, penting untuk memperoleh legitimasi, baik secara de facto maupun de jure. Selain itu, dalam menjalankan kekuasaan, kita juga harus patuh terhadap peraturan yang berlaku, serta didasarkan pada prinsip-prinsip etika, norma, dan nilai-nilai. Hal ini bertujuan agar kekuasaan yang digunakan dapat berjalan secara efektif dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. (Sentra, 2022).

2.10. Teori Kekuasaan Berdasarkan Karisma

Teori ini menganggap kekuasaan sebagai hasil dari daya tarik pribadi dan karisma seorang pemimpin. (Tosari, 2013) Pemimpin karismatik dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain berdasarkan pesona, visi, dan kepribadian mereka. Teori-teori ini memberikan pandangan yang beragam tentang bagaimana kepemimpinan dan kekuasaan dapat dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks. Masing-masing teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis hubungan antara pemimpin dan bawahan, serta peran kekuasaan dalam proses kepemimpinan.

Kharisma merujuk pada sikap yang luar biasa dan daya tarik pribadi yang istimewa. Seorang pemimpin adat adalah teladan bagi masyarakat karena sering memberikan motivasi dan inspirasi kepada mereka. Selain itu, seorang pemimpin adat harus memiliki daya tarik yang unik, yang menjadi bagian dari kharismanya, serta kemampuan-kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hal ini membuat masyarakat memiliki keyakinan dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh pemimpin adat. Masyarakat dan pemimpin adat sama-sama mengerti bahwa menjadi pemimpin adat adalah sebuah anugerah. (Tosari, 2013).

2.11. Relasi Kekuasaan dalam Kepemimpinan Adat

Dalam konteks Kepemimpinan masyarakat Adat (Agung, 2011), konsep Relasi Kuasa memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan praktik kepemimpinan di era modern saat ini. Model kepemimpinan dalam masyarakat adat bervariasi, dengan beberapa menggantungkan legitimasi pada representasi dukungan, sementara yang lain lebih menekankan pada kewibawaan dan kharisma personal pemimpin. Banyak ilmuwan telah berusaha untuk memahami berbagai tipe pemimpin, peran pemimpin, dan asal-usul kemunculan pemimpin dalam konteks masyarakat adat. Menurut Weber (1947), kharisma pemimpin bisa bersumber dari hubungan darah, institusi, atau keturunan. Fiedler (1967) mempelajari berbagai model kepemimpinan, sementara Hencley (1973), Stogdill (1974), Hoy dan Miskel (1987), Hill dan Caroll (1997) mengkaji kinerja kepemimpinan dengan mempertimbangkan aspek pengarahan dan dukungan. Mintzberg melihat pemimpin sebagai pemain peran penting dalam masyarakat, mencakup peran sebagai tokoh, pembicara, dan pemecah masalah.

Di sisi lain, Weihrich dan Koontz (1994), serta Hersey dan Blanchard, lebih fokus pada identifikasi dan penggambaran karakteristik seorang pemimpin. Terdapat banyak pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan, dan tidak semuanya dapat relevan dalam konteks kepemimpinan masyarakat adat di Indonesia. Beberapa konsep mungkin tidak relevan karena berbagai model kepemimpinan yang ada di masyarakat adat tidak selalu tertutup dalam penelitian ilmiah para peneliti. (Agung, 2011).

2.12. Masyarakat Adat dan Praktek-Praktek Budaya Politik

Istilah "masyarakat adat" sering digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada dalam negara-bangsa Indonesia. Secara formal, dalam ilmu hukum dan teori, mereka juga dikenal sebagai "Masyarakat Hukum Adat." Namun, dalam perkembangan terbaru, masyarakat asli Indonesia menolak pengelompokan ini karena adat tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. (Agung, 2011).

dalam literatur peraturan perundangan, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu "masyarakat adat" dan "masyarakat hukum adat." Namun, perbedaan istilah ini tidak menghilangkan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan kriteria-kriteria masyarakat adat sebagai berikut:

Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*). (Agung, 2011) Terdapat kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat. Terdapat wilayah hukum adat yang jelas, dengan pranata dan perangkat hukum, terutama peradilan adat yang masih ditaati. Masih melakukan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

2.13. Perubahan Sosial dan Ekonomi

Menurut (Pongantung, 2018) Meninjau bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi kekuasaan adat adalah hal yang penting. Ini termasuk dampak pertumbuhan penduduk, urbanisasi, mobilitas, dan perkembangan sosial terhadap struktur dan otoritas kepemimpinan adat. Perubahan sosial sering kali memiliki dampak yang signifikan pada dinamika kekuasaan adat dalam suatu masyarakat. Kekuasaan adat merujuk pada sistem hierarki dan pengaturan kekuasaan yang didasarkan pada tradisi, budaya, dan nilai-nilai adat tertentu. Ketika perubahan sosial terjadi, hal ini dapat mengganggu dinamika kekuasaan adat. Perubahan perubahan yang lainnya seperti, modernisasi, industrialisasi, atau globalisasi, dapat mengubah struktur ekonomi juga dalam masyarakat adat itu sendiri.

Perubahan sosial dan Budaya menurut (Pongantung, 2018) adalah manifestasi dari perubahan struktur sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan ini merupakan fenomena umum yang terjadi sepanjang sejarah dalam setiap masyarakat. Hidup dalam masyarakat melibatkan upaya kolektif untuk beradaptasi dengan tantangan lingkungan, namun juga membawa konsekuensi bahwa masyarakat harus terus-menerus menyesuaikan

hubungan internal dan eksternal mereka sesuai dengan tuntutan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan dan dinamika adalah karakteristik mendasar dalam masyarakat dan kebudayaan. Ini adalah kenyataan bahwa perubahan selalu menjadi bagian dari sejarah setiap masyarakat dan kebudayaan. Setiap masyarakat mengalami transformasi sehingga tidak ada dua masyarakat yang memiliki gambaran yang sama dalam periode waktu yang berbeda, baik itu masyarakat tradisional atau modern. (Pongantung, 2018).

2.14. Hubungan dengan Otoritas Pemerintahan Lokal

Hubungan antara Kekuasaan Adat dan otoritas Pemerintah Lokal menurut (Sugiswati, 2012) sangat kompleks dan bervariasi, pada konteks budaya adat, politik, hukum, dan dinamika sosial suatu masyarakat di mulai dari, kolaborasi kemitraan,konflik dan persaingan,pengakuan dan perlindungan hukum,ko-optasi,keterlibatan dalam pengambilan keputusan,dan perubahan politik dan kekuasaan. Namun, Eksistensi masyarakat adat adalah suatu realitas sejarah yang tidak dapat dielakkan atau dipertentangkan oleh pemerintah. Masyarakat adat merupakan bagian yang nyata dari masyarakat Indonesia. Pengakuan formal, penerimaan, atau legitimasi masyarakat adat dalam kerangka ketatanegaraan diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (dikenal sebagai UUD 1945).

Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, ada sebagian pengakuan, penerimaan, dan/atau legitimasi terhadap masyarakat adat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks hubungan daerah dan internasional, pemerintah Republik Indonesia masih menunjukkan sikap yang kurang tegas dalam mengakui, menerima, atau membenarkan eksistensi masyarakat adat. (Sugiswati, 2012)

2.15. Pengaruh Teknologi dan Globalisasi

Pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap Dinamika kekuasaan dalam struktur Kepemimpinan Adat menurut (Burhanudin, 2021) dapat sangat signifikan dan kompleks. Kedua faktor ini dapat merubah cara otoritas adat beroperasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan mempertahankan kekuasaan mereka. beberapa cara di mana teknologi dan globalisasi dapat memengaruhi kekuasaan dalam struktur Kepemimpinan Adat.

Teknologi, seperti internet dan telepon seluler, telah membawa akses informasi global ke komunitas yang sebelumnya mungkin terisolasi. Ini bisa memberi masyarakat akses ke pengetahuan baru, pandangan yang beragam, dan informasi tentang hak-hak mereka. Otoritas

adat mungkin perlu beradaptasi dengan informasi baru ini dan menghadapi pertanyaan atau tuntutan yang lebih kritis dari masyarakat. (Burhanudin, 2021).

Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih cepat dan luas. Budaya dan tradisi lokal dapat terpengaruh oleh budaya global, yang mungkin mengubah nilai-nilai dan norma dalam masyarakat adat. Ini bisa memiliki dampak pada cara otoritas adat mempertahankan kekuasaan mereka berdasarkan tradisi dan nilai-nilai budaya. Teknologi dan globalisasi bisa membuka peluang ekonomi baru atau mengubah struktur ekonomi dalam masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi distribusi kekayaan dan sumber daya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kekuasaan otoritas adat yang mungkin didasarkan pada kepemilikan sumber daya tertentu.

Teknologi dan globalisasi menurut (Rauf, 2016) dapat mempengaruhi hubungan antara otoritas adat dan pemerintah nasional atau lokal. Pemerintah mungkin berusaha mengatur atau mengintegrasikan otoritas adat dalam kerangka hukum nasional atau kebijakan pembangunan. Teknologi bisa menjadi alat dalam mendukung atau melawan upaya-upaya ini. Teknologi telah memungkinkan komunikasi dan keterhubungan yang lebih cepat antara komunitas adat di seluruh dunia. Hal ini bisa membawa pemimpin adat dan aktivis bersama-sama untuk berbagi pengalaman, strategi, dan mendukung satu sama lain dalam mempertahankan hak-hak dan kekuasaan mereka.

Teknologi dapat memberdayakan masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk merekam dan menyebarkan informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak mereka, melalui media sosial misalnya. Ini bisa mengubah dinamika kekuasaan dengan memberikan suara kepada masyarakat dalam hal-hal yang sebelumnya mungkin dikendalikan oleh otoritas adat.

Didalam Globalisasi bisa memicu perdebatan tentang identitas dan asal-usul dalam masyarakat adat. Ketika budaya dan nilai-nilai global bersaing dengan budaya dan tradisi lokal, otoritas adat mungkin harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan legitimasi mereka. (Rauf, 2016)

2.16. Proses Pengambilan Keputusan dan Konflik

Melihat bagaimana keputusan dibuat dalam struktur kepemimpinan adat dan bagaimana konflik diatasi atau timbul dalam konteks kekuasaan adat. Proses pengambilan keputusan dan konflik merupakan dua aspek penting dalam dinamika kekuasaan dalam struktur

kepemimpinan adat. menurut (Marwanti, 2018) Keduanya dapat memengaruhi cara kekuasaan dijalankan, hubungan antara otoritas adat dan masyarakat, serta stabilitas keseluruhan komunitas. Berikut adalah cara di mana proses pengambilan keputusan dan konflik mempengaruhi kekuasaan dalam struktur kepemimpinan adat. Yang di antaranya

1.Konsesus dan Partisipasi

Banyak struktur kepemimpinan adat didasarkan pada prinsip konsensus dan partisipasi. Keputusan-keputusan penting dibuat melalui musyawarah dan mufakat. Hal ini memungkinkan semua anggota komunitas untuk berkontribusi, dan otoritas adat bertindak sebagai pemimpin yang mengoordinasi dan memfasilitasi proses tersebut. (Marwanti, 2018).

2.Peran Otoritas

Otoritas adat memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengarahkan proses pengambilan keputusan. Mereka sering mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk tetua, pemimpin muda, dan perempuan dalam komunitas. (Marwanti, 2018).

3.Pengetahuan Tradisional

Pengambilan keputusan dalam struktur kepemimpinan adat didasarkan pada pengetahuan tradisional, hukum adat, dan nilai-nilai budaya. Otoritas adat memiliki peran dalam menjaga pengetahuan ini dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai komunitas. (Marwanti, 2018).

Konflik didalam dinamika kekuasaan dalam struktur kepemimpinan adat menurut (Rahmawati, 2008) dapat di kategorikan sebagaimana:

1.Perbedaan Pandangan

Konflik dapat muncul jika anggota komunitas memiliki pandangan yang berbeda tentang keputusan yang harus diambil atau arah yang harus diambil oleh kepemimpinan adat. Konflik semacam ini dapat meruntuhkan konsensus dan menyebabkan perpecahan dalam komunitas.

2.Perebutan Kekuasaan.

Konflik mungkin terjadi dalam upaya memperebutkan atau mengonsolidasikan kekuasaan dalam struktur kepemimpinan adat. Ini bisa terjadi ketika beberapa individu atau kelompok ingin memperoleh pengaruh yang lebih besar atau mengambil alih peran otoritas adat.

3. Ketidaksetaraannya Gender dan Generasi

Konflik dapat timbul dari ketidaksetaraan gender atau generasi. Jika perempuan atau pemuda merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, ini bisa menyebabkan ketegangan atau konflik dalam komunitas.

4. Pengaruh Eksternal

Konflik juga dapat dipicu oleh pengaruh eksternal, seperti campur tangan pihak luar atau tekanan dari pemerintah atau perusahaan. Konflik semacam ini dapat menguji otoritas adat dalam melindungi hak dan kepentingan komunitas.

5. Penyesuaian dengan Perubahan

Perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan dapat memicu konflik dalam upaya untuk menyesuaikan struktur kepemimpinan adat dengan tuntutan baru atau perubahan dalam masyarakat. Mengelola konflik dalam struktur kepemimpinan adat adalah tantangan yang kompleks dan sensitif. Upaya untuk memfasilitasi dialog terbuka, mencari solusi inklusif, dan memahami perbedaan dalam pandangan dan kebutuhan komunitas sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas kekuasaan adat. (Rahmawati, 2008)

2.17. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adalah aspek penting dalam dinamika Kekuasaan dalam struktur Kepemimpinan Budaya. Kedua faktor ini berkontribusi pada menciptakan hubungan yang seimbang antara otoritas budaya dan anggota masyarakat, serta membantu menjaga legitimasi dan relevansi otoritas budaya. Berikut adalah beberapa cara di mana pemberdayaan dan partisipasi masyarakat memengaruhi dinamika kekuasaan dalam struktur kepemimpinan budaya. Akses ke Informasi Pemberdayaan dapat ditingkatkan melalui akses yang lebih baik terhadap informasi, terutama dengan teknologi informasi dan internet. Ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mengerti tentang isu-isu yang berkaitan dengan budaya mereka, dan dengan demikian, mereka dapat berpartisipasi dengan lebih informasional dalam keputusan yang memengaruhi mereka (Andayani, 2017).

Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan, Masyarakat Adat harus memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap budaya mereka. (Juhadin, 2019) Ini bisa melibatkan pembentukan dewan konsultasi budaya, forum partisipatif, atau mekanisme lain yang memungkinkan anggota masyarakat memberikan

masukan. Memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang budaya, tradisi, dan sejarah mereka adalah bentuk pemberdayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akar budaya mereka, masyarakat dapat lebih aktif dan efektif dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemeliharaan Warisan Budaya: Pemberdayaan masyarakat juga mencakup upaya untuk memelihara dan merawat warisan budaya mereka. Ini bisa melibatkan pelatihan dalam keterampilan tradisional, dukungan terhadap seniman lokal, atau partisipasi dalam upaya pelestarian.

Partisipasi Masyarakat dalam struktur Kepemimpinan Budaya Musyawarah dan Mufakat Dalam struktur kepemimpinan budaya, partisipasi masyarakat sering diwujudkan melalui musyawarah dan mufakat. Keputusan penting dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, dan pemimpin budaya bertindak sebagai fasilitator. Menghargai Keanekaragaman Partisipasi masyarakat harus menghargai dan memasukkan keanekaragaman pandangan, termasuk dari generasi yang lebih muda, perempuan, dan kelompok minoritas. Ini memastikan bahwa pengambilan keputusan mencerminkan berbagai perspektif. (Juhadin, 2019).

Peningkatan Keterlibatan Perempuan dan Pemuda dalam Meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam struktur kepemimpinan budaya adalah langkah penting untuk menciptakan kesetaraan gender dan memastikan kontinuitas budaya di masa depan. Dukungan Kreativitas dan Inovasi Mendorong partisipasi masyarakat dalam kreasi seni, adat, dan inovasi budaya memungkinkan munculnya ide-ide baru dan peningkatan nilai budaya. bahwa pemberdayaan dan partisipasi masyarakat bukan sekadar alat untuk mempertahankan budaya, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan hubungan yang inklusif antara otoritas budaya dan masyarakat yang mereka layani. Dalam struktur kepemimpinan budaya yang sehat, partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus diakui dan dihormati oleh pemimpin budaya. (Juhadin, 2019) .

2.18. Pentingnya Kearifan Lokal

Pentingnya Kearifan Lokal menurut (Unayah, 2016) Pemerintah bersama masyarakat harus memperhatikan hak-hak dan partisipasi mereka sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak yang bersifat multidimensional, sambil memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Ini sesuai dengan dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat (3), yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional harus dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Konsep kearifan lokal di sini mengacu pada nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya dan menjaga kelestarian lingkungan. Kearifan lokal dapat berwujud dalam bentuk nilai, keyakinan, kebiasaan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam tata kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal, pada dasarnya, mencerminkan sistem nilai budaya suatu kelompok sosial. Meskipun istilah "lokal" seringkali terkait dengan aspek geografis, namun dalam konteks ini, (Unayah, 2016) ia diartikan sebagai bagian integral dari sistem nilai budaya suatu komunitas. Nilai-nilai tersebut mencakup standar hidup yang baik, adil, berkelanjutan, harmonis, serasi, dan seimbang. Lebih lanjut, dalam nilai-nilai tersebut terkandung konsep produktivitas, keadilan/demokrasi, keberlanjutan, serta keselarasan/keharmonisan. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa Kearifan juga dapat dianggap sebagai suatu sistem pemikiran yang bersifat lokal, yang dapat diinterpretasikan sebagai kumpulan ide-ide yang dimiliki secara bersama oleh sebuah komunitas sosial yang mengikuti hukum adat. Sistem pemikiran ini berfungsi sebagai panduan atau kerangka kerja untuk tindakan dan perilaku bersama anggota komunitas tersebut saat berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial mereka. Sistem pemikiran ini berasal dari hasil kristalisasi pengalaman hidup bersama dalam interaksi dengan lingkungan alam dan sosial mereka.

Kearifan lokal merupakan warisan dari nenek moyang yang terdapat dalam tata nilai kehidupan yang melebur dalam bentuk kepercayaan, budaya, dan adat istiadat. Seiring berjalaninya waktu, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungan dengan mengembangkan suatu kearifan yang mencakup pengetahuan atau ide, peralatan, yang diselaraskan dengan norma adat, nilai budaya, serta aktivitas dalam mengelola lingkungan agar memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam sekitarnya. (Unayah, 2016).

2.19. Kerangka pemikiran

Kepemimpinan Adat dan Kekuasaan Menjelaskan konsep kepemimpinan adat, termasuk karakteristik, peran, dan fungsi pemimpin adat dalam masyarakat. bentuk kekuasaan yang terlibat dalam struktur kepemimpinan adat,Konteks Sosial dan Budaya di kampung pulo Menggambarkan latar belakang sosial, budaya, dan sejarah kampung adat pulo sebagai pemahaman tentang penerapan kekuasaan dalam kepemimpinan adat.Perubahan Sosial dan

Ekonomi Mengeksplorasi dampak perubahan sosial dan ekonomi, seperti permasalahan sosial penduduk, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi, terhadap struktur dan pelaksanaan kekuasaan dalam kepemimpinan adat (Ilyas, 2020).

Pengaruh Teknologi dan Globalisasi Menggambarkan bagaimana teknologi modern dan globalisasi memengaruhi tradisi adat, serta dampaknya terhadap cara kekuasaan dijalankan dan diinterpretasikan.

Hubungan dengan Otoritas Pemerintahan Lokal dan hubungan antara kepemimpinan adat dengan pemerintahan lokal, termasuk cara kekuasaan adat berinteraksi dengan kekuasaan politik dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan Keputusan dan Konflik Menganalisis bagaimana keputusan diambil dalam kepemimpinan adat, mekanisme penyelesaian konflik, dan bagaimana dinamika ini memengaruhi struktur dan pelaksanaan kekuasaan.

Adaptasi dan Pelestarian Tradisi Menilai bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi dijaga dalam struktur kekuasaan adat, serta bagaimana tradisi beradaptasi dengan perubahan zaman. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Menggambarkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana partisipasi ini memengaruhi dinamika kekuasaan dalam struktur kepemimpinan. Pentingnya Kearifan Lokal Menyoroti pentingnya kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam menjaga dan menghormati struktur kekuasaan adat.

Dalam kekuasaan dalam model kepemimpinan adat, pemimpin adat dan otoritas mereka memainkan peran sentral. Ini melibatkan hubungan antara pemimpin adat, anggota masyarakat, dan pengambilan keputusan. Pemimpin adat adalah individu yang dipilih atau diakui oleh masyarakat adat untuk memimpin dan mewakili komunitas dalam konteks budaya dan tradisi mereka. Tugas-tugas pemimpin adat bisa meliputi mengadili sengketa, memfasilitasi upacara adat, menjaga keharmonisan sosial, dan mempertahankan warisan budaya.

Otoritas pemimpin adat berasal dari pengakuan masyarakat terhadap pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi mereka dalam menerapkan nilai-nilai tradisional dan menyelesaikan isu-isu masyarakat. Otoritas ini diberikan melalui norma-norma budaya dan adat serta penghargaan atas peran pemimpin adat dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

| no | Aspek Dinamika Kepemimpinan | Deskripsi |
|----|--|---|
| 1 | Pemimpin Adat dan Identitas | Peran Pemimpin Adat dalam menjaga dan mewujudkan identitas Budaya dan Tradisi |
| 2 | Pengambilan keputusan | Proses pengambilan Keputusan dalam Masyarakat dan Peran Pemimpin Adat |
| 3 | Hubungan dengan Masyarakat | Interaksi Pemimpin Adat dengan anggota masyarakat dan komunikasi |
| 4 | Penyeimbang Kekuasaan Adat dan Budaya Kampung Pulo | Bagaimana Pemimpin adat menjaga keseimbangan dalam Kepemimpinan |
| 5 | Penyesuaian terhadap perubahan | Bagaimana Pemimpin Adat beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan |
| 6 | Konflik dan penyelesaian | Bagaimana Pemimpin Adat menangani konflik dan mencari solusi |
| 7 | Representasi eksternal | Hubungan Pemimpin Adat dengan pihak luar dan peran mereka dalam komunitas |

Daftar tabel 2.1

2.20. Penelitian Terdahulu

Skripsi 1

Judul: Elite Berkusa dan Kepemimpinan Tradisional (Studi Kasus Relasi Berkusa antara Pemerintah Takalar dengan Karaeng Galesong)

Penulis: Muhammad Aedil Akbar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar

Tujuan: Mengetahui eksistensi Karaeng Galesong dalam era demokrasi dan hubungan antara Pemerintah Daerah dan Karaeng.

Jenis Penelitian: Kualitatif (Triangulasi, analisis data induktif)

Metode: Penelitian deskriptif untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek atau subjek.

Skripsi 2

Judul: Kepemimpinan Adat Lampung Sayibatin Perspektif Fiqh Siyasah

Penulis: Yulida Leza, Universitas Islam Raden Lampung

Tujuan: Mengetahui bentuk Kepemimpinan Adat Saibatin di Pekon Pagar dan pandangan Fiqh Siyasah terhadapnya.

Jenis Penelitian: Kualitatif (lapangan, deskriptif analisis)

Metode: Observasi, wawancara, pustaka.

Skripsi 3

Judul: Relasi Kuasa Desa Dinas dan Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Batu Kaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Penulis: Luh Putu Tuti Yuliani, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta

Tujuan: Menjawab relasi kuasa dan model governance pada Desa Adat dan Desa Dinas di Desa Batukaang.

Jenis Penelitian: kualitaif(deskriptif)

Metode: pendekatan deskriptif

Skripsi 4

Judul: Studi Etnografi Komunikasi Ritual Adat Masyarakat Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Tujuan: Mengetahui situasi komunikatif pada Ritual Adat Ngaibakan benda pusaka di Kampung Pulo.

Jenis Penelitian: Kualitatif (Etnografi)

Metode: Pendekatan etnografi dengan penelitian lapangan.